



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARJONI**
2. Jabatan : **KEPALA LOKA**
3. NHK : **524690**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 860.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 298 m2/227 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 386 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. Tanah Seluas 520 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. Tanah Seluas 335 m2 di KAB / KOTA KOTA BAUBAU , HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
5. Tanah Seluas 227 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. Tanah Seluas 199 m2 di KAB / KOTA KOTA KENDARI , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
7. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA WAKATOBI, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 75.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU AYL A M Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 150.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 27.390.192



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.113.090.192
III. HUTANG	Rp.	360.397.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	752.693.192

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.